

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN
MUSI BANYUASIN TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Dhimas Aditya Pratama Putra
07011381621122**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**Dhimas Aditya Pratama Putra
07011381621122**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 22 Desember 2020

Pembimbing I

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2019* " telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal Januari 2021.

Palembang, 7 Januari 2021

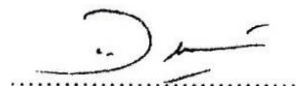
Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Anggota

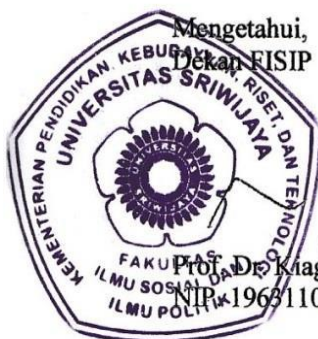
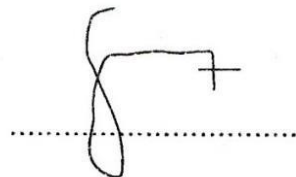
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



3. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



4. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 196806091984031002



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Aditya Pratama Putra

NIM : 07011381621122

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan ini sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 2 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Dhimas Aditya Pratama Putra

07011381621122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah akan meniggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)*

*“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak daru suatu kegagalan-kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”
(Sir Winston Churchill)*

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua Orangtua saya, Bapak Tjiptoning Wisnu dan Ibu Sulisyaning Nugraheni.
2. Mami saya Merry Rusdi
3. Adik saya Yudhistira Beryl Wisnu Putra
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fisip Unsri.
5. Teman angkatan 2016 Ilmu Administrasi Publik.
6. Almamater Tercinta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Permasalahan yang ada dilatarbelakangi kurangnya sosialisasi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Pemungutan pajak menurut Nick Devas yang meliputi Aspek upaya Pajak, Hasil Guna, dan Daya Guna. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan yaitu Pertama, banyaknya wajib pajak yang tidak mau melaporkan objek pajaknya dan wajib pajak sering memanipulasi objek pajaknya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka solusinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus lebih giat untuk mengadakan sosialisasi tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan cara memberikan hadiah bagi wajib pajak yang taat agar wajib pajak tertarik dan sadar untuk melaporkan objek pajaknya ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

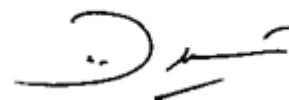
Kata kunci : Pemungutan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, upaya pajak, hasil guna, daya guna, sosialisasi

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.si
NIP. 196311061990031001

PEMBIMBING II



Dwi Mirani, S.IP, M.si
NIP. 198106082008122002

Palembang, 7 Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the collection of tax on land and building rights in Musi Banyuasin Regency. The problems that exist are motivated by the lack of socialization from the Regional Tax and Retribution Management Agency for the Musi Banyuasin Regency. The research method used is a type of qualitative research with a descriptive approach. The theory used is the theory of tax collection according to Nick Devas which includes aspects of tax effort, yields and utility. Data collection techniques used include interviews and documentation. The results of the study were found, first, the number of taxpayers who do not want to report their tax objects and taxpayers often manipulate their tax objects due to the lack of public awareness of paying taxes. Second, the socialization carried out by the Regional Tax and Retribution Management Agency of Musi Banyuasin Regency is still less optimal, so the solution is that the Musi Banyuasin Regency Regional Tax and Retribution Management Agency must be more active in disseminating information regarding the tax on the acquisition of rights to land and buildings by giving gifts to obedient taxpayers so that taxpayers are interested and aware of reporting their tax objects to the Regional Tax and Retribution Management Agency office of Musi Banyuasin Regency


Keywords: *Collections, fees for acquisition of land and buildings, tax efforts, utilization, efficiency, socialization*

ADVISOR I




Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.si
NIP. 196311061990031001

ADVISOR II



Dwi Mirani, S.IP, M.si
NIP. 198106082008122002

Palembang, 7 January 2021
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019”.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Tjiptoning Wisnu Ari dan Ibu Sulistyaning Nugraheni yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama masa perkuliahan. Mami saya Merry Rusdi yang telah banyak mendoakan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir.H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan, Bapak Sofyan Effendy, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik
5. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan dan telah memberikan motivasi kepada saya dalam menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya, selalu memberikan bimbingan, arahan dan selalu memberikan nasehat dan motivasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktunya, selalu memberikan bimbingan, arahan dan selalu memberikan nasehat dan motivasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
9. Mbak Ades selaku Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membantu dalam mengurus perkuliahan.
10. Seluruh staf dan dan karyawan FISIP Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Seluruh pegawai Seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB dan staff Informasi, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan

penulis, memberikan ilmu serta membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

12. Adik saya Yudhistira Beryl Wisnu Putra yang juga selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Teman-teman di Gondang Squad, Jipek, Deka, Basilius, Dinda, Nova, Desmita, Tiwik yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini serta banyak membagikan pengalaman selama masa perkuliahan.
14. Teman teman di Kabinet OP SP, Panji, Hadi, Adit, Ragil, Wahyu, Alham, Ilham, Nopra yang telah memberikan pengalaman dalam masa perkuliahan.
15. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan pengalaman dalam masa perkuliahan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan keikhlasan Bapak/ibu dan teman-teman sekalian mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum seutuhnya sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Palembang, 7 Januari 2021

Dhimas Aditya Pratama P

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Keuangan Negara.....	8
2. Teori Pemungutan.....	9
3. Pajak Daerah.....	11
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	17
5. Teori Nick Devas.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Definisi Konsep.....	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Informan Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten MUBA...34	
1. Letak Geografis BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	37
3. Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	47
3. Visi dan Misi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	48

B. Hasil dan Pembahasan.....	46
1. Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>).....	50
2. Hasil Guna (<i>Effetiveness</i>).....	58
3. Daya Guna (<i>Efficiency</i>).....	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan Realisasi BPHTB MUBA Tahun 2014-2019	6
2. Penelitian Terdahulu	22
3. Fokus Penelitian	27
4. Rekap Total Satuan Pendidikan Tingkat SD dan SMP Tahun 2019.....	53
5. Daftar Jumlah Wajib Pajak Di BPPRD Kabupaten MUBA.....	61
6. Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	27
2. Gedung BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	36
3. Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	47
4. Mekanisme Pajak BPHTB.....	52
5. Ruang Pelayanan Pajak BPHTB.....	53
6. Bank Sumsel Babel yang bekerja sama dengan BPPRD.....	55
7. Kegiatan Sosialisasi BPPRD.....	56
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 11 Tahun 2010.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penunjukan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I
4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II
5. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji I
6. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji II
7. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
8. Surat Balasan Penelitian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Musi banyuasin
9. Data Target dan Realisasi BPHTB tahun 2014-2019
10. Pedoman wawancara
11. Foto kegiatan wawancara
12. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
13. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II
14. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPPRD	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PDRB	: Produk Domesti Regional Bruto

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah satu upaya untuk berinvestasi dalam pembangunan adalah dengan menarik pendapatan sebesar-besarnya untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya dan sumber daya untuk mengembangkan daerah. Untuk mendukung pembangunan pemerintahan daerah yang benar-benar bertanggung jawab, maka perlu peningkatan investasi pemerintah dalam penerimaan dalam negeri khususnya pajak daerah, pemungutan pajak daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Negara diberdayakan untuk mencari sumber daya yang sesuai dengan kemungkinan dan kondisi negaranya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Negara (PAD). (Brno ,Czech Republic : 2014)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Negara merupakan bentuk reformasi tingkat negara bagian. Reformasi di tingkat akar rumput disebut desentralisasi dan kebijakan konsolidasi pemerintah daerah dikenal sebagai otonomi daerah. Salah satu implementasi dari kebijakan negara dan otonomi negara adalah pemungutan pajak yang dulunya dikelola oleh pemerintah pusat, sekarang dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. (Halim, 2009)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Bea Masuk Negara

Upaya mewujudkan daerah otonom yang besar, nyata dan bertanggung jawab, keuangan pemerintah dan pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah perlu ditingkatkan agar otonomi daerah dapat dibiayai oleh pemerintah daerah. (Ardiansyah : 2010)

Pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan untuk memungut pajak tertentu, melakukan upaya khusus untuk mengamankan sejumlah uang tertentu untuk membiayai pengeluaran berulang dan pembangunan, membuat pengaturan yang diperlukan untuk administrasi negara, dan memperoleh beberapa pendanaan daerah. ah. sistem transfer federal (Halim, 2009:154).

Dipahami bahwa dalam konteks ekonomi, teknologi informasi, pembangunan sosial dan politik, perlu mengubah aturan umum dan sistem perpajakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih besar, meningkatkan layanan wajib pajak, meningkatkan pemeriksaan dan penegakan hukum, serta memprediksi kemajuan teknologi informasi dan perubahan aspek signifikan di sektor pajak. Selain itu, perubahan tersebut antara lain peningkatan profesionalisme petugas pajak, peningkatan transparansi dalam administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemungutan pajak adalah alternatif yang paling layak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini karena pajak memiliki jumlah yang tetap. Pajak daerah juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pendanaan pemerintah daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia antara lain pajak pemerintah (pajak pusat), pajak negara, pajak negara, pajak dan retribusi, dan penerimaan bukan pajak bagi pemerintah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pendanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah dengan meningkatkan dan mencermati setiap kapasitas yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah..

Agar pemungutan pajak dan pihak-pihak yang terlibat memahami pemungutan pajak secara efektif, harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan negara yang mengatur pajak negara. Hal ini tentunya perlu dibagikan oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memantau penyampaian, namun di sisi lain masyarakat menginginkan agar pemungutan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

No. 32 Tahun 2000 menjelaskan PAD yang bersumber dari sumber keuangan sebagaimana tersebut di atas, harus selalu diupayakan peningkatannya dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan negara. Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajiban nasionalnya, yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Tjahjono, 2008 : 162-173).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak negara bagian dan kabupaten, dewan daerah kini mendapat tambahan sumber penerimaan dari pajak daerah, sehingga kini pajak kota/kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Lampu Jalan, Pajak Baja Tahan Karat dan Mineral, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Kabupaten Musi Banyuasin, bagian dari Negara Persemakmuran Republik Indonesia (NKRI), merupakan salah satu kota di Sumatera Selatan yang berada di daerah otonom. Kota Musi Banyuasin juga memiliki kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan pusat. Untuk menjalankan program pemerintah, Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah otonom yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, kegiatan pemerintahan dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara untuk meningkatkan PDA adalah dengan meningkatkan pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendanaan Pendapatan Pokok Negara (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Pajak negara merupakan komponen wajib kepada pemerintah daerah yang dibayar oleh orang pribadi atau kelompok, diatur oleh pemerintah dalam UU Lr. Kabupaten Banyuasin No. 30 tahun 2002 tentang pajak negara.

Salah satu jenis pajak yang menjadi pajak daerah adalah Pabean Akses Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasal 1 UU Lr. 21/1997 jo. UU No. 20 Tahun 2000 Pajak atas perolehan

tanah dan/atau hak guna bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan tanah dan/atau hak guna bangunan. Akses atas tanah dan/atau bangunan adalah peralihan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan terjadinya akses terhadap hak seseorang atau badan hukum atas tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak-hak administrasi dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6698 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Pokok Pertanian. Undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perumahan tanggal 16 dan 1985.

Hak Atas Tanah Paragraf 1 Pasal 16 UU Lr. 6698. 5 1960 menyatakan bahwa hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak pertanian, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak dagang, hak tagih hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak. yang lebih tinggi akan ditentukan oleh hukum dan hak-hak sementara.

Terkait pemungutan BPHTB oleh Badan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, berikut adalah data target dan realisasi penerimaan BPHTB Musi Banyuasin tahun 2016 hingga 2019.

Tabel 1 Target dan Realisasi BPHTB Musi Banyuasin Tahun 2014-2019

NO.	Tahun	Target APBD	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2014	17. 565. 034.524	30.472.285.943	172%
2	2015	18.227.740.960	14.545. 120.064	80%
3	2016	16.800.000.000	29.741.970.877	148.33%
4	2017	17.800.000.000	17.321.222.160	103%
5	2018	17.800.000.000	36.923.688.674	207,44%
6	2019	17.800.000.000	10.648.464.062	59,82

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Dari Data Penerimaan BPHTB Tahun 2016-2019 terlihat bahwa penerimaan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir verifikasi penerimaan negara melalui BPHTB telah mencapai tingkat yang terukur. Total tingkat keberhasilan tahunan telah melebihi 100%, dengan pengecualian 2015 dan 2019.

Penurunan tajam penerimaan BPHTB selama tahun 2015 dan 2019 menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Perlu upaya dan penelitian lebih untuk memahami mengapa verifikasi penerimaan sama dengan target APBD tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis BPPRD Musi Banyuasin terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB berjudul “Analisis Penilaian Koleksi Tersedia Hak Atas Tanah dan Bangunan. Oleh Musi Banyuasin Direktorat Jenderal dan Pengelola Penyelenggara Negara Kabupaten 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai pemungutan Bea Masuk Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pajak Daerah dan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam hal pendanaan Negara dan Fiskal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang fenomena yang terjadi saat ini, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Badan Pengelola Pajak dan Bea Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, 2009. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Tiga. Jakarta
- Ardiansyah. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Sektor Informal, Makasar.
- Devas Nick, 1999. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta.
- A.W. Widjaja, 1993. Komunikasi dan hubungan masyarakat, Jakarta.
- Kansil dan Christine S.T, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1988, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso. 1982. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta
- Azhari A. Samudra. 1995. Peraturan Umum Tentang Pajak Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 1998, Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. California: Sage Publication.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hariadi, Pramono dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta; Amus dan Citra Pustaka.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung.

Tulisan Ilmiah

- Diah, Ayu Ida Kencana dan Suartana. 2018. *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money dan Sistem Online Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Badung*. Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya. Volume 22 Nomor 2.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 13 Nomor 1 2015
- Khalikkhusabir. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan value for money (Studi Pada Dinas PU Pengairan, Binamarga, dan Cipta Karya Probolinggo*. Malang. E-jurnal riset Prodi Manajemen Universitas Islam Malang.

- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU NO 22 Tahun 1999 Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan, dan Kompleksitasnya*. SIS XXIX Npmor 1 Jakarta.
- Mandagi, Junisa dkk. 2018. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Manado*. Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 13 Nomor 2.

Internet

- _. 2017. *Pengertian Konsep secara umum dan Para ahli Lengkap*. Sumberpengertian.id 22 Juni 2017. (<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-konsep-secara-umum-dan-menurut-para-ahli>)
Pajak Edisi Minggu 16 September 2018. (<https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>)
- Prameka, Shabrina Aulia. 2012. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*. (<https://www.researchgate.net/publication/328380909>)